



# PERAN PUSTAKAWAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN *LITERATE SOCIETY* (BEST PRACTICE PUSTAKAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO)

Ayu Wulansari  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Korespondensi: [ayu\\_lib@umpo.ac.id](mailto:ayu_lib@umpo.ac.id)

Disubmit : 21-08-2020  
Direview : 10-10-2020  
Direvisi : 24-01-2021  
Diterima : 22-03-2021

## ABSTRACT

**Introduction.** This study is a best practice librarian Muhammadiyah Ponorogo University in its role to realize the literate society. Blended librarian takes a role in the literacy reinforcement ecosystem by bringing the library closer to the people who are not limited to the physical building. College Library is one of the ecosystems for strengthening literacy for welfare. This study aims to find out how the librarians of Muhammadiyah Ponorogo University conduct transformation of inclusion-based higher education libraries.

**Theory.** Policies to strengthen literacy for welfare can be implemented well if supported by a good ecosystem.

**Results and Discussion.** Running a community service program requires cooperation with other parties including the government, the private sector, and the community. So what is done can touch its essence, namely literate society, so that prosperity can be realized through literacy.

**Conclusion.** The constraints faced are hay which need to be used as experience and most importantly there must be an effort to evaluate so that literacy sustainability to the community can run well and sustainably

## ABSTRAK

**Pendahuluan.** Kajian ini adalah merupakan best practice pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam perannya mewujudkan literate society. Blended librarian mengambil peran dalam ekosistem penguatan literasi untuk kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pustakawan universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam melakukan transformasi perpustakaan perguruan tinggi berbasis inklusi sosial.

**Metode penelitian.** Metode penelitian melalui pendekatan diskriptif.

**Hasil pembahasan.** Kebijakan penguatan literasi untuk kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh ekosistem yang baik. Peran blended librarian (pustakawan Perguruan Tinggi) Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjawab tantangan ini, dengan membuat program pengabdian masyarakat dan menjalankan programnya bekerjasama dengan pihak lain termasuk pemerintah, swasta, masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan dapat menyentuh esensinya yaitu literate society, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat melalui literasi.

**Kesimpulan.** Kendala yang dihadapi perlu menjadi pengalaman dan yang terpenting harus ada upaya mengevaluasi sehingga keberlangsungan literasi kepada masyarakat dapat berjalan baik dan berkesinambungan programnya.

**Keywords:** Universities; Blended librarian; Transformation Libraries; literacy society.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan bangsa ini tidak terlepas dari visioner cemerlang para *founding fathers* negara yang memiliki cita-cita luhur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Mengemban dan mewujudkan amanah ini secara konstitusi melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas bagi segenap warga Negara. Pendidikan dapat mendorong terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan dapat melahirkan generasi yang



cerdas dan berpengetahuan luas serta memiliki keterampilan, menguasai teknologi menuju transformasi sosial menuju masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perpustakaan dan pendidikan merupakan sebuah kesatuan dari strategi kebudayaan untuk mewujudkan *literate society* melalui gerakan literasi yang bersifat kolektif. *Literacy* dan *literate society* merupakan puncak dari proses panjang pendidikan formal, informal, non formal yang ditempuh masyarakat yang terwujud dalam suatu gerakan kebudayaan yang bersifat kolektif. Perpustakaan memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan (*knowledge society*). Perguruan tinggi merupakan bagian dari pendidikan formal tinggi yang memiliki kewajiban dengan Tri Darma Perguruan Tinggi menurut UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9 yang memiliki kewajiban dalam melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (UU No.12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9 <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-12-tahun-2012-ttg-pendidikan-tinggi.pdf> )

Perpustakaan perguruan tinggi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan tinggi memiliki kewajiban dalam membantu mewujudkan *literate society* melalui pengabdian masyarakat. Meskipun seringkali perpustakaan dan pustakawan tidak mengambil peran tersebut. Hal ini dipicu kurangnya empati dan kesadaran untuk melakukan edukasi kepada masyarakat yang *notabene* merupakan tugas pemerintah. Padahal untuk mewujudkan *literate society* dibutuhkan sebuah kerangka kerja bersama, kolektif kolegial yang berarti tidak dapat hanya diserahkan kepada pemerintah akan tetapi menjadi tanggungjawab masyarakat seluruhnya. Salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakberdayaan pustakawan dalam melakukan literasi kepada masyarakat adalah paradigma masyarakat terhadap perpustakaan, bahwa perpustakaan adalah tempat pasif dan tidak memiliki nilai hidup yang di dalamnya terdapat sebuah praktik budaya yang aktif dan dinamis (Laugu, 2015). Paradigma tersebut harus dihilangkan dari seorang pustakawan perguruan tinggi, bahwa dunia perpustakaan dan kepustakawanan perguruan tinggi salah satunya mengambil bagian untuk ikut mewujudkan *literate society*.

Menumbuhkan paradigma positif masyarakat terhadap perpustakaan haruslah ditunjukkan kiprah nyata pustakawan didalam masyarakat. Peran aktif pustakawan didalam masyarakat sangat di tunggu keberadaan dan keaktifannya. Barometer kecerdasan sebuah Negara salah satunya dilihat dari keberaksaraan masyarakatnya yang di sinyalir dengan tinggi atau rendahnya minat baca dan budaya baca di Negara tersebut. Indonesia peringkat 62 dari 70 negara menurut hasil penelitian *Program for International Student Assessment* (PISA) rilis *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) tahun 2015 (Damarjati, 2019). Tetapi saat ini tahun 2018, Indonesia menduduki ranking 17 dari seluruh dunia dalam menghabiskan waktu membaca dalam kurun waktu mingguan versi *statistica charts* bersumber dari *NOP Culture Score index* (McCarthy, 2016) berarti saat ini pemerintah dan masyarakat secara bersama bergerak untuk ikut mewujudkan *literacy society*. Hal ini merupakan sebuah tantangan dan peluang pustakawan untuk mengambil bagian dan menjadi salah satu penggerak literasi kepada masyarakat.

*Blended librarianship* menjadi terminologi baru yang muncul dalam kepustakawanan di Perpustakaan Perguruan Tinggi, yaitu konsep pustakawan yang memiliki kemampuan tradisional dan kemampuan teknologi informasi. Menurut (Shank & Bell, 2011) *blended librarianship* adalah “*An academic librarian who combines the traditional skill set of librarianship with the information technologist’s hardware/software skills, and the instructional or educational designer’s ability to apply technology appropriately in the teaching-learning process.* Menurut pengertian tersebut menjadikan pustakawan perguruan tinggi harus memiliki kemampuan lebih sebelum menjadi *educator* untuk civitas akademika khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bagaimana pustakawan dapat mengajar dan menjadi *educator* bagi masyarakat apabila tidak memiliki keahlian teknologi informasi yang saat ini menjadi eranya? Hal ini menjadi sebuah motivasi untuk meningkatkan kompetensi. Selain daripada itu pustakawan harus mampu berkolaborasi dengan seluruh pihak sehingga mampu mewujudkan adanya masyarakat yang *literate*.

Paparan diatas menyisakan sebuah pertanyaan apa kiprah pustakawan perguruan tinggi dalam mewujudkan *literate society*? Apakah hanya berkiprah dan mengambil andil dalam layanan kepada sivitas akademika? Bagaimana dengan masyarakat di luar ruang pendidikan perguruan tinggi? Tanggung jawab sebagai warga kampus yang memiliki amanah tridarma perguruan tinggi seyogyanya mampu mengambil peran dalam mensejahterakan masyarakat melalui literasi. Menjadikan perpustakaan dekat kepada masyarakat tidak dapat dilakukan dengan sebatas fisik perpustakaan tetapi esensinya menyentuh ke seluruh masyarakat. Membawa perpustakaan dekat dengan masyarakat merupakan ide untuk menjadi solusi dalam melakukan literasi kepada masyarakat. Transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Bahwa perpustakaan bukan hanya untuk para orang berilmu, dosen, profesor tetapi untuk seluruh masyarakat.

Oleh sebab itu kajian ini akan melihat peran pustakawan perguruan tinggi dalam mendukung program pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dengan mewujudkan *literate society*. Sebagai mitra pemerintah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta memiliki kewajiban untuk mendukung program tersebut. Kurangnya peran pustakawan, kolaborasi dan komitmen menjadi perhatian penting dalam kajian ini.

Hal inilah yang melatarbelakangi kajian ini yaitu untuk mengetahui sejauhmana peran pustakawan perguruan tinggi dalam mewujudkan *literate society*. Kajian ini merupakan *best practice* pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo merupakan wilayah di Jawa Timur secara administrative memiliki 21 kecamatan, 397 desa/kelurahan, 1002 lingkungan/dusun dengan jumlah penduduk 869,89 ribu jiwa (BPS,2018). Saat ini Ponorogo belum terbebas dari buta huruf. Tercatat angka buta huruf tahun 2017 mencapai 10,93 persen, dari masyarakat usia 15 tahun ke atas belum dapat membaca dan menulis (BPS Kabupaten Ponorogo, 2018). Sedangkan jumlah perpustakaan desa di kabupaten Ponorogo sejumlah 36 perpustakaan dengan keadaan perpustakaan yang tidak secara keseluruhan “hidup” hanya 20 perpustakaan desa yang secara formal “hidup” (Dinas Perpustakaan Kabupaten Ponorogo, 2018)

Kondisi wilayah dan jumlah penduduk serta keadaan buta huruf di daerah Ponorogo perlu adanya sebuah kerjasama dari seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta. Kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Ponorogo menjadi sebuah renungan bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang mengemban tridarma Perguruan tinggi termasuk unit penunjang yaitu perpustakaan. keterlibatan pustakawan dalam mendorong dan mengambil bagian dari program pemerintah ini menjadi sebuah pertanyaan pertanyaan “Bagaimana pustakawan perguruan tinggi berperan?”

Kajian ini mengambil judul “Peran Pustakawan Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan *Literate Society* (best practice pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo)”. Kajian ini merupakan sharing pengalaman, apa yang sudah dilakukan, dari hasil evaluasi dan kendala yang di alami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam mewujudkan *literate society* dan mentransformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi di Kabupaten Ponorogo.

## 2. METODE

Kajian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai peran dan langkah yang dilakukan oleh pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam mewujudkan *Literate Society*.

## 3. TINJAUAN LITERATUR

### 3.1. Perpustakaan Perguruan Tinggi

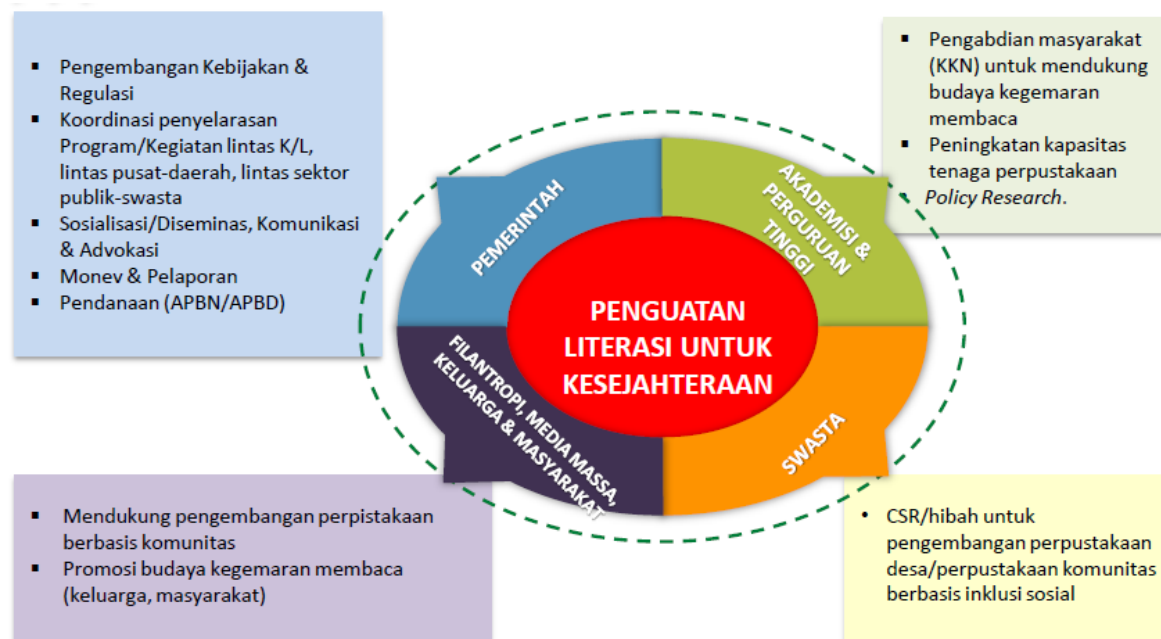
Perpustakaan perguruan tinggi merupakan sarana penunjang dalam mendukung kegiatan akademik perguruan tinggi. Menurut Sjahrial-Pamuntjak & Rusina perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang tergabung dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, baik berupa perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, perpustakaan akademik, perpustakaan sekolah tinggi (Berawi, 2012).

Perpustakaan perguruan tinggi adalah “Perpustakaan yang dikelola oleh perguruan tinggi dengan tujuan membantu terpenuhinya tujuan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tinggi yang layanannya diperuntukkan sivitas akademika perguruan tinggi yang bersangkutan” (Hasugian, 2009).

UU Nomor 43 Tahun 2007 menjelaskan fungsi utama perpustakaan perguruan tinggi adalah sebagai tempat menyimpan segala literatur sumber acuan dalam belajar dan dapat memberikan pelayanan kepada pengguna yaitu mahasiswa, dosen dan civitas akademik. Kehadiran perpustakaan dituntut dapat melakukan perubahan yang membawa ke arah kebaikan, inovatif, kreatif, kebermanfaatan bagi seluruh komponen masyarakat (Aini, 2014).

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan salah satu ekosistem penguatan literasi untuk kesejahteraan. Kebijakan penguatan literasi untuk kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh ekosistem yang baik. Ekosistem penguatan literasi untuk kesejahteraan setidaknya terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah akademisi/perguruan tinggi, swasta, filantropi, media massa, keluarga dan masyarakat (Alchumami, 2018).





**Gambar 1. Ekosistem penguatan literasi untuk kesejahteraan**

Gambar tersebut diatas merupakan alur dari ekosistem penguatan literasi untuk kesejahteraan. Ekosistem tersebut alur kolaborasi, saling mendukung dan menjadi satu kesatuan gerakan dalam mendukung kebijakan penguatan literasi. Perpustakaan Perguruan tinggi merupakan penunjang akademis memiliki peran didalamnya yaitu pengabdian masyarakat (KKN) untuk mendukung budaya kegemaran membaca dan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan *policy research*. Sedangkan perguruan tinggi swasta berada di sektor swasta maka memiliki peran hibah pengembangan perpustakaan desa/perpustakaan komunitas berbasis inklusi. Peran perpustakaan dan kepastakawanan perguruan tinggi sebagai bagian dari ekosistem langkah idealnya mengambil peran sebagai penguat literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tenaga pustakawan dalam hal ini adalah para pustakawan tentunya meningkatkan kemampuan, kompetensi, keterampilan, dan keunggulan di dalam mendukung kebijakan ini.

### 3.2. Blended Librarianship

Terminologi baru dalam perpustakaan perguruan tinggi dalam menjawab perkembangan teknologi informasi dengan istilah *blended librarian*. Jhon & Steven membuat konsep *blended librarianship* di awal tahun 2004. “.....*blended librarianship relates to old and new service models of academic librarianship*”(Shank & Bell, 2011). “*An academic librarian who combines the traditional skill set of librarianship with the information technologist’s hardware/software skills, and the instructional or educational designer’s ability to apply technology appropriately in the teaching-learning process*”(Shank & Bell, 2011).

*Blended librarianship* adalah pustakawan perguruan tinggi yang menggabungkan layanan konvensional/tradisional dan layanan modern dengan keunggulan teknologi dan menggunakan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. *Blended librarian* (Shank & Bell, 2011) adalah pustakawan perguruan tinggi yang mampu mengkombinasikan 3 (tiga) komponen.

Komponen tersebut meliputi keterampilan kepastakawanan tradisional (*the traditional skill set of librarianship*), Keterampilan teknologi informasi baik *hardware/software* (*the information technologist’s hardware/software skills*) dan kemampuan mendesain instruksional atau pembelajaran untuk menerapkan teknologi yang tepat dalam proses belajar mengajar (*the*

*instructional or educational designer's ability to apply technology appropriately in the teaching-learning process*)(Hasibuan, 2017).

*Blended librarian* adalah “profesional bidang akademik” yang memberikan layanan sekaligus memiliki ketrampilan dan/atau kemampun untuk mendukung lembaganya dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran. Mereka adalah pustakawan yang bekerja di Perpustakaan Perguruan Tinggi yang memberikan layanan kepada *stakeholders* perguruan tinggi, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kepustakawanan, mampu bermitra dengan stakeholder dan mampu mampu berjejaring dan berkolaborasi dengan pustakawan lain. Untuk perguruan tinggi di Indonesia sekarang ini(Hasibuan, 2017).

Prinsip *blended librarian* adalah pertama memimpin di kampus sebagai inovator dan agen perubahan melalui layanan informasi. Kedua, berkomitmen mengembangkan inisiasi literasi informasi seluruh kampus. Ketiga, mendesain program pendidikan/pelatihan membantu staf dan pengguna memanfaatkan perpustakaan secara penuh. Keempat. bekerjasama dengan ahli teknologi informasi dan pembelajaran, kelima implementasi perubahan inovatif, kreatif, dan adaptif dalam layanan perpustakaan dan pendidikan pemakai, dan keenam Transformasi *relationship* dengan stakeholder(Hasibuan, n.d.) Konsep mampu bermitra dan berjejaring inilah yang dapat menjadi jalan untuk melakukan pendidikan kepada pengguna di lingkungan perguruan tinggi dan berkolaborasi baik internal maupun eksternal institusi sehingga mampu menjadi bagian dari ekosistem penguat literasi masyarakat (*literate society*) agar mampu mewujudkan kesejahteraan.

### **3.3. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

Perpustakaan sebagai pusat ilmu dan pengetahuan yang melahirkan berbagai inovasi sosial, pengembangan khazanah kebudayaan bangsa, dan pelestarian naskah nusantara. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat(Alchumami, 2018). Perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun *knowledge society* dan akan memajukan peradaban. Peran perpustakaan untuk mewujudkan ini melalui literasi kepada masyarakat.

Literasi secara konvensional dipahami hanya sebatas kemampuan mengenali abjad dan angka yang tercermin pada kemahiran membaca, menulis, dan berhitung (*read, write, arithmetic*). Literasi dasar meliputi literasi bahasa dan sastra, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan(kemendikbud, 2017). Menurut UNESCO “....more than reading and writing but how about we communicate in society. It's about social practices and relationship about knowledge, language, and culture”(Literacy, a UNESCO perspective; 2003).

Makna literasi sudah meluas telah mengalami pembaharuan. Pembaharuan dan pemutakhiran ini mencakup *cognitive skills* yaitu kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi dokumen tertulis, naskah cetak yang dihubungkan dengan konsep-konsep yang kompleks. Mencakup kemampuan berpikir logis dan kritis serta keterampilan analisis, yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sehingga segenap potensi yang dimiliki setiap individu dapat berkembang. Kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan(Alchumami, 2018).

Literasi mampu memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan

perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan(Alchumami, 2018).



Gambar 2. Kebijakan Transformasi Perpustakaan

Gambar 2 menjelaskan kebijakan transformasi perpustakaan. Arah kebijakan ini menjelaskan bahwa transformasi perpustakaan memiliki 3 tujuan meliputi pertama, pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi melalui pemerataan layanan perpustakaan, peningkatan akses informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan perkuatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga. Kedua, meningkatkan budaya gemar membaca melalui peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi, peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan dan peningkatan kampanye budaya gemar membaca. Ketiga, meningkatkan pengelolaan pelestarian fisik, serta kandungan informasi, bahan pustaka dan naskah kuno melalui konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno, pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno(Alchumami, 2018).

#### 4. PEMBAHASAN

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan salah satu ekosistem penguatan literasi untuk kesejahteraan. Ekosistem tersebut haruslah berkolaborasi saling mendukung dan menjadi satu kesatuan gerakan dalam mendukung kebijakan penguatan literasi. Perpustakaan Perguruan tinggi merupakan penunjang akademis memiliki peran di dalamnya yaitu pengabdian masyarakat (KKN) untuk mendukung budaya kegemaran membaca dan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan *policy research*(Alchumami, 2018). Keterampilan kepustakawan tradisional (*the traditional skill set of librarianship*), keterampilan teknologi informasi baik *hardware/software* (*the information technologist's hardware/software skills*) dan kemampuan mendesain instruksional atau pembelajaran untuk menerapkan teknologi yang tepat dalam proses belajar mengajar(Hasibuan, 2017).

Peran pustakawan perguruan tinggi sebagai *blended librarian* harus mampu mengambil langkah dalam mendukung kebijakan penguatan literasi untuk kesejahteraan karena perguruan

tinggi atau dunia akademik menjadi bagian dari ekosistem penguatan literasi. Bagaimana Perpustakaan Perguruan Tinggi mampu menjadi bagian ekosistem penguat literasi? Bagaimana Pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam upaya mewujudkannya? Berikut berbagai pengalaman dalam kajian ini adalah peran Pustakawan Universitas Muhammadiyah melakukan berbagai peran dengan memberikan ruang di dalam layanannya. Berpedoman pada tridarma perguruan tinggi maka peran yang dilakukan oleh *blended librarianship* Universitas Muhammadiyah sebagai penguat literasi memasukkan program kerja yang diterjemahkan dengan berbagai aktifitas. Peran pustakawan dalam langkah-langkahnya meliputi:

#### 4.1 Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi Sosial

Pertama perencanaan, setiap organisasi memiliki perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan mendatang. Perencanaan ini bertolak dari visi misi organisasi. Demikian pula dengan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Perencanaan dalam melakukan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi telah di rintis 2 tahun terakhir. Perencanaan program kerja yang terstruktur dan memiliki target dan capaian didalam kegiatannya. Program kerja tersebut merupakan arahan capaian kinerja.

Peran pustakawan Universitas Muhammadiyah disini adalah membuat konsep pemerataan layanan perpustakaan berbasis kemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

##### a. Pemerataan layanan perpustakaan

Pemerataan layanan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo membuka diri untuk melayani masyarakat umum. Pustakawan melayani masyarakat yang membutuhkan informasi terutama pemerintah yang membutuhkan sumber informasi sebagai bahan referensi untuk riset. Perpustakaan membuka diri bagi siswa sekolah baik tingkat TK sampai SMA. Kunjungan dan literasi untuk siswa dilakukan secara berkala.



Gambar 3. Kegiatan literasi anak sekolah

##### b. Pendampingan literasi informasi

Pustakawan mengajar adalah *blended librarian* yang dilakukan pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam hal ini melakukan pengajaran dengan Program literasi informasi bagi civitas akademika telah dilakukan. Pustakawan mengajar dan mendukung pengajaran, membuat instruksional pembelajaran literasi. Program literasi wajib bagi mahasiswa semester 5 dan atau semester 6. Bagi dosen program literasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing fakultas atau *by request*.

Pustakawan melakukan pendampingan literasi bagi masyarakat umum baik dari pihak sekolah maupun masyarakat umum berkolaborasi dengan mahasiswa. Pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo menginisiasi dan membuat komunitas literasi aksara surya yang terdiri dari mahasiswa. Komunitas ini secara internal mendapatkan literasi di kampus dengan mengadakan banyak agenda mulai bedah buku, pelatihan kepenulisan, bedah film, diskusi bulanan, dan dari



komunitas ini pustakawan terbantu untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Agenda kegiatan membawa perpustakaan untuk masyarakat umum dengan acara gerakan membaca dan mendongeng untuk mencerdaskan anak bangsa. Kegiatan ini dilakukan 1 bulan sekali dengan keliling desa di kabupaten Ponorogo. Hal ini mendukung Kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan rutin pekanan dilakukan pustakawan dan mahasiswa yang tergabung dalam komunitas literasi “Aksara Surya” dengan konsep “nglapak”. Melapakkan buku pada kegiatan Ahad Pagi Al-Manar dan di taman kota.

Pendampingan literasi untuk sekolah pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo melakukan pendampingan manajemen perpustakaan di sekolah-sekolah. Pendampingan ini diawali dengan pelatihan manajemen perpustakaan yang dilaksanakan pada 17 Maret 2017 yang menghasilkan sebuah forum bersama yaitu “Forum Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah” karena kewajiban di persyarikatan Muhammadiyah Perguruan Tinggi wajib melakukan pendampingan pada amal usaha lainnya. Berikutnya kegiatan untuk mempersatukan seluruh komunitas literasi di Ponorogo dengan agenda acara workshop Lintas komunitas literasi yang di hadiri lebih dari 5 Komunitas dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Ponorogo.

Pendampingan literasi untuk sekolah pustakawan mengadakan pelatihan Gerakan Literasi Sekolah yang di hadiri oleh 55 Sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat di Karisidenan Madiun pada maret 2019 dan membentuk forum Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Kegiatan ini untuk melakukan pendampingan dan berbagi tentang menumbuhkan gerakan literasi sekolah pada masing-masing sekolah. Tindak lanjut dari kegiatan ini terjalannya kerjasama yang memfokuskan pada pendampingan manajemen perpustakaan dan pengembangan kegiatan GLS.



**Gambar 4. Kegiatan workshop dan debat literasi**

**c. Perkuat kerja sama dan jejaring perpustakaan**

Berjejaring itu penting, berkolaborasi itu ringan. Berjejaring dan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal merupakan hal yang harus dilakukan. Bekerjasama dengan mahasiswa, dosen, pimpinan selaku pemangku kebijakan terus diupayakan.

Bekerjasama antar satuan kerja juga dilakukan. Perpustakaan bekerjasama dengan LPPM (Lembaga pengkajian pengabdian masyarakat) Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan memberikan ruang bagi perpustakaan untuk melakukan KKN literasi. Pustakawan memberikan materi kepada para dosen pendamping lapangan (DPL) untuk bekerjasama bersama mahasiswa membuat perpustakaan dimana tempat KKN berada. Memasukkan program KKN berbasis literasi. Dari 71 desa tempat KKN pada tahun 2018 baru 3 tempat KKN yang bekerja bersama perpustakaan untuk mendirikan perpustakaan masjid dan mengedukasi masyarakat. Hal ini masih sangat minim sekali dari jumlah total desa. Program ini merupakan program baru di tahun 2018. Dari kerjasama ini perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk menentukan model literasi berbasis KKN sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kerjasama juga dilakukan dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta serta komunitas literasi. Upaya yang dilakukan pustakawan ini untuk menjadikan perpustakaan milik seluruh masyarakat meskipun perpustakaan perguruan tinggi. Kerjasama dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo sebagai mitra untuk mendampingi 5 (lima) perpustakaan desa sebagai replika perpustakaan berbasis inklusi sosial.

#### **d. Meningkatkan budaya gemar membaca**

Budaya gemar membaca merupakan salah satu pilar dalam mencerdaskan masyarakat. Pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo berkolaborasi dengan mahasiswa, dosen memberikan ruang bebas bagi masyarakat. Bekerjasama antar satuan kerja mulai dari program studi dan satuan kerja lainnya seperti BIPA untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat.

#### **e. Meningkatkan pengelolaan pelestarian fisik melalui konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno**

Pustakawan mengembangkan layanan untuk melestarikan kebudayaan dengan membuat "*reog corner*". *Corner* ini menyimpan seluruh terbitan yang melatarbelakangi adanya reog ponorogo dan babat Ponorogo. Perkembangan tiap tahun untuk bahan pustaka tidak kurang dari 10 judul. Karena untuk menelusuri dokumen yang terkait dengan reog membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Total koleksi *reog corner* mencapai 104 judul(laporan.libsis.ac.id). Harapan dari adanya reog corner ini ke depan perpustakaan memasukkan unsur museum di dalamnya. Karena kekayaan *local content* bernilai tinggi sebagai sumber informasi.

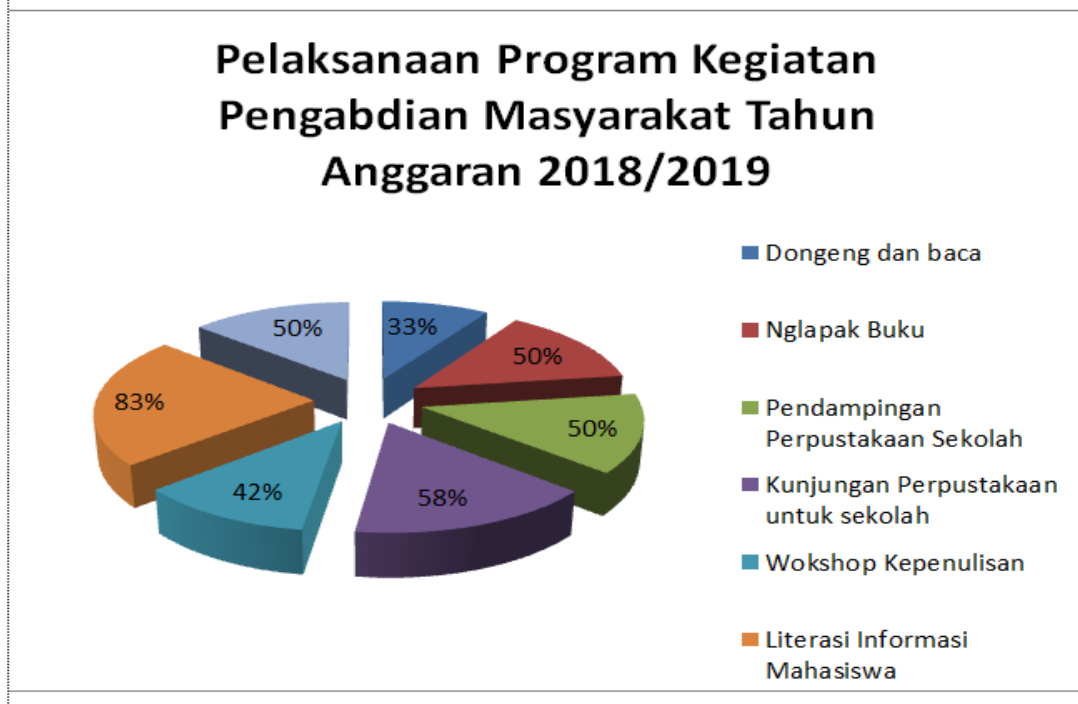
### **4.2. Kendala Transformasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Berbasis Inklusi Sosial**

Penerapan program ini tentulah mengalami hambatan maka langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi, agenda evaluasi merupakan hal terpenting untuk keberlangsungan sebuah program. Pertanggungjawaban kepada pimpinan selaku pemangku kebijakan harus diberikan informasi apa saja yang telah dilakukan. Pelaksanaan program tentu memiliki kendala. Kendala yang ada menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Kondisi internal dan eksternal sangat memengaruhi komitmen dalam keberlangsungan melakukan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Ponorogo merupakan wilayah di Jawa Timur secara administratif memiliki 21 kecamatan, 397 desa/kelurahan, 1002 lingkungan/dusun dengan jumlah penduduk 869,89 ribu jiwa (BPS,2018). Saat ini Ponorogo belum terbebas dari buta huruf. Tercatat angka buta huruf tahun 2017 mencapai 10,93 persen, dari masyarakat usia 15 tahun ke atas belum dapat membaca dan menulis (BPS Kabupaten Ponorogo, 2018).

Kondisi geografis dan banyaknya jumlah penduduk serta kondisi buta huruf saat ini belum mampu menjangkau seluruh masyarakat karena masih sangat sedikit dan minim. Pengabdian masyarakat dengan literasi ke masyarakat masih jauh dari harapan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah

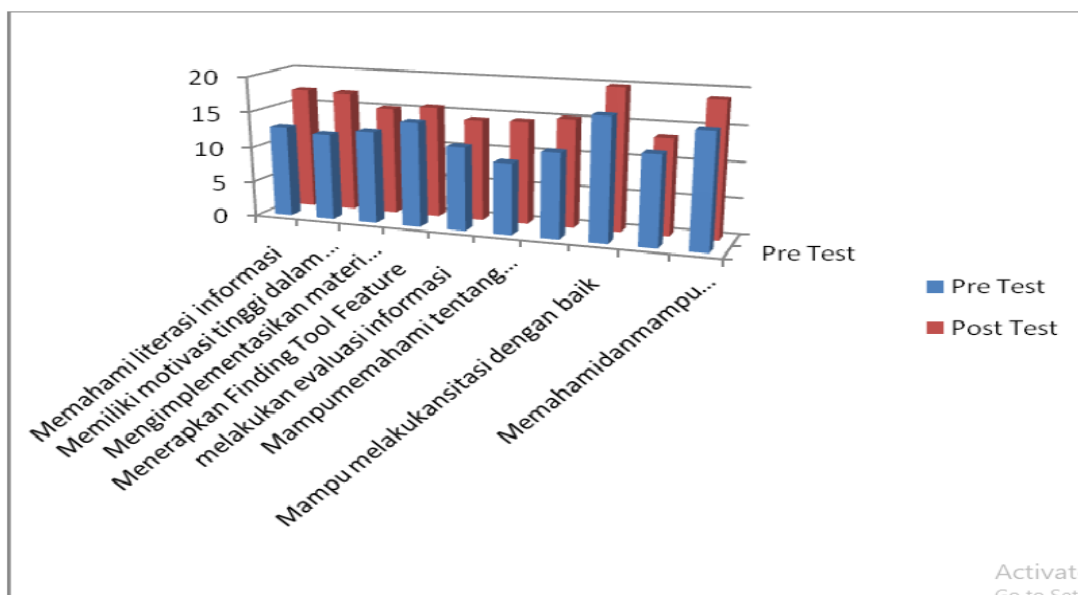
#### **a. Komitmen**

Keberlangsungan dalam memberikan literasi kepada masyarakat yang sejauh ini telah dilakukan masih jauh dari harapan. Prosentas kontinuitas pendampingan kepada masyarakat tergolong sangat rendah pada kegiatan dongeng dan baca untuk anak masih perlu ditingkatkan. Dari hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:



**Gambar 5. Program kegiatan Pengmas tahun anggaran 2018/2019**

Dalam grafik tersebut tergambar kegiatan pengabdian masyarakat (Pengmas) meliputi program nglapak buku, pendampingan perpustakaan sekolah, dongeng dan baca, kunjungan perpustakaan untuk sekolah, workshop penulisan, literasi informasi untuk mahasiswa, dan literasi informasi untuk dosen. Dari grafik tersebut hanya literasi informasi mahasiswa yang mencapai prosentase tertinggi yaitu 83% sedangkan lainnya masih dibawah 50 %. kegiatan literasi informasi kepada mahasiswa merupakan kewajiban. Tujuannya adalah mengubah perilaku atau *attitude* mahasiswa dalam melakukan pencarian informasi, mengevaluasi dan menggunakan informasi dengan baik dan cerdas sehingga tidak terjadi pelanggaran akademik atau plagiarisme. Evaluasi literasi informasi kepada mahasiswa sebagaimana berikut:



**Gambar 6. Hasil evaluasi LI terhadap *attitude* Mahasiswa tahun 2018**

Kegiatan lainnya yang masih di bawah 50 %, maka perlu dilakukan evaluasi dan penelitian untuk mengetahui keberlangsungan kegiatan.

b. Kolaborasi

Untuk memulai kolaborasi perlu adanya lobi dan negosiasi, melakukan komunikasi aktif dengan seluruh pihak untuk dilakukan kerjasama, baik pemerintah, swasta, masyarakat dan terutama adalah civitas akademika. Kolaborasi perlu digalakkan dan terus diupayakan menjadi mitra dalam bekerjasama meskipun kadang pustakawan masih di anggap nomor kesekian.

c. Kebijakan pimpinan

Dukungan pimpinan perguruan tinggi merupakan dukungan terbaik dalam hal motivasi baik material dan finansial. Memberikan ruang bagi pustakawan untuk maju bergerak dalam mencerdaskan bangsa. Kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pimpinan merupakan modal utama dalam bergerak mewujudkan serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat.

## 5. KESIMPULAN

Berbagi pengalaman merupakan virus baik bagi pustakawan perguruan tinggi lainnya. Akan tetapi dari apa yang dilakukan pustakawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo perlu melakukan evaluasi kebermanfaatn literasi kepada masyarakat, perlu adanya penelitian yang lebih menjangkau akan esensi dan keberhasilan kegiatan ini.

Peran *blended librarian* (pustakawan Perguruan Tinggi) Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjawab tantangan ini dengan membuat program pengabdian masyarakat dan menjalankan programnya bekerjasama dengan pihak lain termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian apa yang dilakukan dapat menyentuh esensinya yaitu *literate society* sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat melalui literasi. Kendala yang dihadapi menjadi pengalaman dan yang terpenting harus ada upaya mengevaluasi sehingga keberlangsungan literasi kepada masyarakat dapat berjalan baik dan berkesinambungan programnya.

## REFERENSI

Aini, R. N. (2014). Kolaborasi Pustakawan & Mahasiswa: Sebuah Best Practice di Fakultas Biologi. *Lib Universitas Gajah Mada*, 9.



- Alchumami, A. (2018). Kebijakan-Pembangunan-Perpustakaan-Berbasis-Inklusi-Sosial-Dalam-Mendukung-Pencapaian-Sdg. *Kebijakan-Pembangunan-Perpustakaan-Berbasis-Inklusi-Sosial-Dalam-Mendukung-Pencapaian-Sdg*. Presented at the Kongres IPI, Surabaya.
- Berawi, I. (2012). Mengenal Lebih Dekat Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Jurnal Iqra*, 06, 14.
- BPS Kabupaten Ponorogo. (2018). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2018*. BPS Kabupaten Ponorogo.
- Damarjati, D. (2019, April 1). Benarkah Minat Baca Orang Indonesia Serendah Ini? *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-4371993/benarkah-minat-baca-orang-indonesia-serendah-ini>
- Hasibuan, J. (2017). Blended Librarianship dan Pengguna Multitasking. <Http://Repository.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/64556>.
- Hasugian, Jonner. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. USU Press.
- kemendikbud. (2017). *Materi Pendukung Literasi Baca Tulis*. Kemendikbud.
- Laugu, N. (2015). *Representasi Kuasa Dalam Pengelolaan Perpustakaan*. Gapernur Press.
- Literacy, a UNESCO perspective; 2003*. (n.d.). 31.
- McCarthy, N. (2016, Okt). Which countries read the most? *Statista*. <https://www.statista.com/chart/6125/which-countries-read-the-most/>
- Shank, J. D., & Bell, S. (2011). Blended Librarianship. *Reference & User Services Quarterly*, 51(2), 105–110. <https://doi.org/10.5860/rusq.51n2.105>